



Pekerja Sosial Perlu Kaderisasi

YOGYAKARTA – Kaderisasi pekerja sosial di kota Yogyakarta perlu segera dilakukan. Langkah ini harus dijalankan, mengingat saat ini banyak pekerja sosial yang sudah berusia lanjut.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Yogyakarta Hadi Muchtar mengakui sebagian besar pekerja sosial yang ada di Yogyakarta sudah berusia lanjut. Sehingga kaderisasi mutlak dilakukan agar Yogyakarta tidak kekurangan pekerja sosial. Keberadaan pekerja sosial sangat strategis dalam melaksanakan berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial.

"Karena sebagian pekerja sosial sudah berusia lanjut, hanya ada beberapa pekerja sosial yang dikirim ke Jakarta guna melakukan sertifikasi," ungkap Hadi di sela-sela Rapat Koordinasi

Pengembangan (Rakorbang) SDM dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Hotel New Saphir Yogyakarta, kemarin.

Hadi mengatakan untuk mengatasi masalah itu, saat ini sedang merekrut pekerja sosial dari kalangan anak-anak muda, terutama yang memiliki jiwa sosial tinggi dan lulusan perguruan tinggi. Nantinya mereka akan ditempatkan pada tugas yang menyasar kesejahteraan sosial bukan hanya sosial kemiskinan, namun juga masalah penyandang sosial lainnya, seperti kaum disabilitas dan anak jalanan. "Karena itu, tiap tahun, kami akan upayakan penghargaan untuk memotivasi pekerja sosial," katanya.

Sekretaris Jenderal Kemensos Toto Utomo Budi Santosa menambahkan, untuk masalah terbatasnya pekerja sosial ini, bukan hanya terjadi di Yogyakarta,

"Karena sebagian pekerja sosial sudah berusia lanjut,"

HADI MUCHTAR
Kepala Dinsosnakertrans

ta, namun juga secara nasional. Menurut Toto, dengan 15,5 juta keluarga yang mengalami masalah sosial, setidaknya membutuhkan 155.000 pekerja sosial. Namun kenyataannya, saat ini hanya tersedia 15.522 orang sehingga masih kurang sekitar 139.000 pekerja sosial.

"Sekarang kami mulai melakukan sertifikasi kompetensi. Agar pekerja sosial bisa terlatih dan Professional. Sehingga walau untuk jumlah terbatas,

capaian program kesejahteraan sosial bisa optimal," katanya.

Menurut Toto, dengan terbatasnya pekerja sosial itu, menjadikan untuk jangkauan sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial masih di bawah 10%. Terutama dalam lima tahun terakhir, hanya mampu menjangkau 8% dari 15,5 juta keluarga yang mengalami masalah sosial.

Meski begitu, tingginya permasalahan sosial itu juga tidak bisa jika hanya dilimpahkan pada urusan negara saja. Namun, seluruh elemen masyarakat memiliki kewajiban berperan dalam mengatasi masalah ini.

"Pada masa yang akan datang, pemerintah daerah akan mengendalikan seluruh kegiatan teknis. Pusat hanya akan mengurus regulasi," paparnya.

● **priyo setyawan**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005